

# KONI Sumut Apresiasi Pembangunan Gedung Boling



Medan, 19/12 (LintasMedan) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) untuk menyelesaikan pembangunan gedung boling di kawasan Jalan Willem Iskandar Medan. Diharapkan, pada tahun 2017 sarana tersebut sudah bisa

difungsikan.

“Kami sangat mengapresiasi semangat pemerintah khususnya Gubsu untuk membangun gedung. Semoga cepat selesai sehingga prestasi olahragara boling bisa berkesinambungan,” ungkap Ketua Harian KONI Sumut John Ismadi Lubis kepada wartawan di Medan, kemarin.

Pada PON 2016 lalu, boling menyumbangkan satu medali emas melalui Aldila Indriati. Selain Dila, ada beberapa atlet yang juga potensi membawa nama harum Sumut di pentas nasional. Karena itu, dengan terbangunnya sarana boling yang komprehensif diharapkan pembinaan berjalan maksimal.

Di gedung boling tersebut, KONI Sumut memproyeksikan menjadi sarana latihan olahraga anggar.

John juga berharap sarana sport centre yang jadi cita-cita Gubsu HT Erry Nuradi bisa segera terbangun mulai 2017. “Kita bersyukur karena Gubsu sedang semangat sekali membangun olahraga, mudah-mudahan harapan beliau untuk membangun sarana olahraga, pertama boling dan kedua, sport centre bisa terealisasi,” ucap John.

John Lubis, juga mengapresiasi Pengprov Persatuan Bowling Indonesia (PBI) Sumut yang telah mengupayakan beasiswa kepada Aldila Indriati untuk kuliah selama 4 tahun di Wichita State University, Amerika Serikat. Di sana, Dila bakal berlatih di salah satu klub ternama Shocker Bowling.

Namun PBI Sumut masih akan berdiskusi soal biaya hidup Dila selama di Amerika yang nilainya antara 25.000 hingga 30.000 US Dolar per tahun.

“Kalau disana memang untuk bowling kita wajib membantu. Tapi karena Aldila juga atlet Prima (Pelatnas), kami akan meminta bantuan ke KOI,” tutur John. (LMC/rel)

---

## PT Aquafarm Gelar Donor Darah



Donor darah PT Aquafarm Nusantara, pekan kemarin di areal perusahaan itu di Desa Naga Kisar. (Foto: LintasMedan/ist)

Pantai Cermin, 19/12 (LintasMedan) – Minat masyarakat Sumatera Utara (Sumut) melakukan donor darah saat ini cukup tinggi. Selain baik untuk kesehatan juga sangat membantu masyarakat (pasien) yang membutuhkan tambahan darah. Apalagi saat ini, permintaan darah cukup tinggi.

“Dengan adanya aksi donor darah yang dilakukan perusahaan-perusahaan seperti yang dilakukan pihak PT Aquafarm Nusantara (AN) saat ini, akan sangat membantu pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan darah,” kata Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Deliserdang dr Lili Indah Sari Siregar kepada wartawan, di sela-sela kegiatan donor darah PT Aquafarm, Sabtu di lingkungan perusahaan tersebut di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Dikatakan Lili, saat ini kebutuhan darah untuk rumah sakit (RS) khususnya di Kabupaten Deliserdang rata-rata berkisar 800 kantong per bulan. “Mudah-mudahan kebutuhan itu bisa terpenuhi tiap bulannya,” paparnya.

Menurutnya, dalam kegiatan aksi donor darah yang dilakukan, golongan darah yang banyak terhimpun adalah golongan darah 0 dan yang paling sulit atau langka golongan darah AB.

Untuk menjadi pendonor, kata Lili, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, antara lain minimal usia 17-65 tahun, HB harus normal yaitu di atas 12,5, berat badan minimal 50 kg, tekanan darah 110-140 per 60-90. Dan, yang paling penting pendonor harus dalam keadaan sehat tidak memiliki riwayat penyakit besar seperti jantung dan diabetes.

“Semua darah yang didonorkan ini, kita lakukan pemeriksaan lagi atau kita screening untuk mendeteksi apakah darah tersebut terinfeksi hepatitis C, hepatitis B, HIV dan spilis. Kalau misalkan ada kita temukan darah tersebut terinfeksi penyakit-penyakit di atas maka harus kita musnahkan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Donor Darah PT Aquafarm Nusantara Sahrial mengatakan, aksi donor darah ini diikuti oleh keluarga besar PT Aquafarm, masyarakat sekitar perusahaan serta dari lembaga Lateral. "Target tahun ini sebanyak 150 orang yang ikut mendonorkan darahnya sudah terpenuhi," kata dia.

Dikatakannya, pihaknya bersyukur karena kegiatan donor darah ini selalu didukung oleh masyarakat sekitar perusahaan termasuk para kepala desanya yang juga ikut mendonorkan darahnya.

Seperti Kepala Desa (Kepdes) Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan Jaffar Sidik, Kepdes Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan dan Sekretaris Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin Ahmad.

"Kegiatan donor darah ini juga merupakan bagian dari program CSR (Coorporate social responsibility) Aquafarm yang diusahakan dilakukan setiap tahun sejak tahun 2013, 2015 dan 2016," jelas Sahrial.

Kegiatan donor darah tersebut juga dihibur oleh seorang kontestan Rising Star Trio Wijaya yang diadakan salah satu stasiun televisi swasta di dalam negeri dari Kota Medan. (LMC/rel)

---

## **PBI Sumut Berharap Gedung Boling Segera Rampung**



**Atlet boling Sumut Ardilla Indri peraih medali emas PON XVI di Jawa Barat/2016. (Foto:LintasMedan/ist)**

Medan, 17/12 (LintasMedan) – Pengurus Provinsi Persatuan Boling Indonesia (Pengprov PBI) Sumatera Utara berharap proses pembangunan gedung boling bisa segera rampung pada 2017.

Keinginan ini terkait dengan kebutuhan pembinaan bagi atlet-atlet boling di daerah ini.

“Kita berharap segera terealisasi dan tidak ada kendala dalam proses pembangunannya, sehingga sarana tersebut bisa segera kami manfaatkan,” ungkap Sekretaris Pengprov PBI Sumut Herman kepada wartawan, kemarin.

Gedung yang berada di kawasan Sport Centre, Jalan Willem Iskandar Medan itu, sudah dimulai pembangunannya pada 2015 lalu. Namun pengadaan sarana lintasan dan perlengkapan boling tidak terlaksana karena tidak ada penawaran setelah dua kali proses lelang. Tahun ini, kemungkinan Pemprovsu melalui panitia lelang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan menunjuk langsung penyedia yang mampu mengadakan peralatan tersebut sesuai spesifikasi yang diharapkan.

Pembangunan gedung boling ini merupakan wujud apresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas prestasi atlet boling Sumut. Setelah pada PON 2012 meraih 2 perak, pada PON 2016, sukses merebut 1 medali emas melalui Aldila Indriati.

Keberhasilan Aldila meraih emas sekaligus menorehkan sejarah baru cabang boling Sumut yang sudah 27 tahun tidak pernah meraih medali emas di even berskala nasional.

Gubsu HT Erry Nuradi dalam satu kesempatan merasa prihatin dengan keberadaan para atlet dan penggemar olahraga boling di Sumut yang sempat kehilangan sarana latihan dan pertandingan berskala nasional. Sehingga Plt Gubsu HT Erry Nuradi turut mendorong terbangunnya sarana boling tersebut.

“Prestasi boling semakin menambah semangat kita membangun arena boling,” ujar Gubsu Erry Nuradi saat jamuan makan siang atas undangan pembina PBI Sumut dr Rayati Syafrin, 6 September lalu.

Gedung boling dibangun di areal seluas 1.200m persegi. Bangunan dua lantai itu nantinya berisi tribun penonton, memiliki 18 lintasan dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Herman menjelaskan, gedung boling di Jalan Williem Iskandar Medan nantinya menjadi sarana strategis bagi pengembangan atlet boling di Sumatera Utara. Ia bersama pengurus lainnya sudah berencana membuat akademi boling bekerjasama dengan akademi boling Singapura. (LMC/rel)

---

## **Warga Kelurahan Banten Timur Keluhkan Lokasi Perkuburan**



Darwin Lubis  
(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 17/12 (LintasMedan) – Warga Jalan Pukat II, gang Aneka Lingkungan 13, Kelurahan Banten Timur, Kecamatan Medan Tembung mengeluhkan lokasi pekuburan di Jalan Bersama yang kondisinya sangat semak dan jorok. Selain itu, akses jalan menuju lokasi perkuburan juga sulit untuk dilalui karena dipakai pedagang untuk berjualan sayuran dan lainnya.

“Memang lokasi perkuburan ini adalah wakaf dari perkebunan sejak lama. Akan tetapi areanya berada di Kota Medan. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Kota Medan bisa mendesign perkuburan ini seperti perkuburan lainnya yang ada di Kota Medan. Tidak hanya itu, Pemko Medan juga menertibkan para pedagang yang berjualan di akses jalan masuk menuju perkuburan,” kata salah seorang warga Jalan Pukat II, gang Aneka Lingkungan 13, Kelurahan Banten Timur, Kecamatan Medan Tembung, Farida pada saat Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Hanura, Ir. Darwin Lubis, Kamis (15/12). Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Lingkungan 13.

Sementara itu, salah seorang warga lainnya, Ahmad Tohir Nasution meminta agar pendidikan ditingkat SMA sederajat pada awal Januari 2017 mendatang yang akan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU), diharapkan menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaannya.

Warga juga mengeluhkan program Presiden Joko Widodo yakni

Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pasalnya, masih banyakn warga dilingkungan ini yang belum terdata dan mendapatkannya.

Menanggapi hal itu, Darwin mengatakan dikarenakan lokasi perkuburan ini merupakan wakaf, untuk itu kepling dan lurah harus membuat laporan kepada Pemko Medan agar di tata dengan baik sama seperti lokasi perkuburan lainnya.

“Untuk masalah pedagang, kepling dan lurah harus berkordinasi dengan Pemko Medan agar bisa ditertibkan dan menjaga kebersihannya. Namun demikian masalah ini tetap akan saya sampaikan nantinya kepada Pemko Medan,” kata Darwin.

Mengenai KIP, Darwin meminta kepling menjelaskan kepada warga tentang prosedurnya sekaligus mendata warga yang belum menerima, agar segera diajukan kepada pemerintah.

“Meskipun ini program Pemerintah Pusat, namun kewajiban kepling mendata warganya yang belum mendapatkan KIP,” ucap Darwin. (LMC/rel)

---

**Warga Glugur Darat, Griya  
Tangkahan dan Sicanang  
Keluhkan Infrastruktur dan  
Limbah**





Anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli saat melakukan reses baru-baru ini di Medan. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 17/12 (LintasMedan )- Warga kawasan Jalan Bukit Barisan Lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Glugur Darat 1 dan 2, Kecamatan Medan Timur mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang babak belur akibat proyek pengerjaan gorong-gorong oleh Pemerintah Pusat.

Keluhan warga ini terungkap saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai NasDem, HM. Nezar Djoeli, ST di Jalan Bukit Barisan, Medan, Kamis (15/12). Hadir pada kegiatan reses tersebut Kepala Seksi Trantib Kecamatan Medan Timur, Joni A Tanjung dan salah seorang tokoh masyarakat Agus.

Pada kesempatan tersebut, Joni A Tanjung mengatakan reses Anggota DPRD Sumut yang saat ini dilaksanakan merupakan suatu kebanggaan bagi warga Medan Timur, karena bisa bertemu langsung dengan wakilnya yang ada di DPRD.

“Kita doakan agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat nantinya bisa diteruskan oleh Bapak Nezar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan,” katanya.

Sementara salah seorang warga, Rohani mengatakan, warga disekitar jalan Bukit Barisan sangat mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang hancur lebur pasca pengerjaan proyek

Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) yang tidak diaspal kembali. Sehingga mengakibatkan banjir jika hujan turun dan bahkan membuat pengendara kendaraan baik roda dua ataupun roda empat merasa cemas jika melintasi jalan ini. Bahkan ada pengendara yang jatuh akibat lubang yang tergenang air.

Salah seorang warga lainnya, Ariandi mengatakan pengorekan drainase yang ada di jalan Krakatau hanya sebagian saja, sehingga gorong-gorong tersumbat yang mengakibatkan warga yang berada di kawasan jalan Mahameru dan Pasar 3 selama kurun waktu lima sampai tujuh tahun terakhir terus mengalami banjir.

Pada kesempatan itu, warga juga meminta agar pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program Presiden Joko Widodo, dibantu oleh pemerintah karena data yang masih tumpang tindih. Tidak hanya itu warga juga meminta bantuan untuk pembangunan Masjid dan bantuan dana Bansos disalurkan kembali untuk anak sekolah.

Pada reses hari kedua, Jumat (16/12), HM Nezar Djoeli di Lingkungan 7 & 8 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan warga mengelukan persoalan titi penghubung ke Kelurahan Sicanang yang rusak dan hampir rubuh akibat banjir rob. Warga meminta agar masalah ini segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, titi tersebut merupakan akses masyarakat sehari-hari.

Masih dihari kedua reses, tepatnya di Perumahan Griya Martubung 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Lurah Tangkahan, Ibnu Abbas yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan warga dikelurahannya sudah lama mengeluhkan limbah PT. KIM yang mengalir keparit warga yang ada di Kelurahan Tangkahan, sehingga warga selalu mencium bau dan sering menyebabkan banjir besar.

“Saya bersama warga yang tergabung dalam Forum Limbah Banjir telah melakukan untuk rasa di PT. KIM untuk meminta mereka

menutup saluran pembuangan limbah yang mengarah ke parit warga. Namun sampai saat ini janji tinggal janji. Jadi saya atasnama warga Kelurahan Tangkahan meminta Bapak Nezar Djoeli untuk segera memanggil PT. KIM untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, warga saya sudah sangat keberataan dengan limbah yang setiap harinya mengalir,” kata Abbas.

Perlu diketahui saat melakukan unjuk rasa bersama warga, PT. KIM berjanji pada tanggal 16 Desember 2016 akan membuat Master Plan untuk menutup saluran limbahnya yang mengalir ke parit warga, namun sampai sekarang belum terlihat. Bahkan warga pernah mengancam akan menutup paksa aliran limbah PT. KIM tersebut yang sering membuat parit warga meluap dan banjir.

Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan status perumahan Griya Martubung 3 yang belum diserahkan dari pihak Perum Perumnas kepada Pemerintah Kota Medan. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kota Medan belum dapat ‘campur tangan’ dalam menata permahan Griya Martubung 3 tersebut.

“Kami juga mengeluhkan BPJS dan KIP, yang menyebabkan belum tersalurkannya ke warga,” kata salah seorang warga B.Nduru.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Nezar merasa sangat kecewa dengan kondisi yang terjadi. Beliau berjanji akan segera memanggil PT. KIM ke DPRD Sumut.

Menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat Kelurahan Kecamatan Medan Timur, Nezar mengatakan jalan yang kondisinya saat ini babak belur, dikarena Pemerintah Pusat mengerjakan proyek gorong-gorong. Namun setelah pengerjaan proyek selesai, mereka tidak mengaspal jalannya secara keseluruhan, melainkan hanya tambal sulam saja.

“Beberapa bulan lalu, saya sudah mengkritisi di beberapa media dan pada Bulan Mei lalu juga kami sudah mendatangi Pemerintah Pusat untuk meminta agar proyek ini dihentikan karena tidak diaspal kembali. Selain itu, kami juga meminta agar setiap pengerjaan proyek seperti ini, pemerintah pusat harus

mengaspal jalan kembali,” ujarnya.

Untuk itu, melalui reses ini ia kembali akan menyampaikan keluhan masyarakat ini kepada Pemerintah Provinsi melalui sidang Paripurna DPRD Sumut dan juga Musrembang untuk tingkat provinsi dan juga Kota Medan. (LMC/rel)

---

## **Banjir, Warga Akui Khawatir Jika Hujan Turun**



**Anggota DPRD Sumut Eveready Sitorus (tengah) didampingi tokoh masyarakat dan Kepala Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang saat melakukan reses ke wilayah itu, Jumat (16/12). (Foto:lintasmedan/irma)**

Batang Kuis, 16/12 (LintasMedan) – Sejumlah warga Dusun III Desa Ujung Benteng Kecamatan Batang Kuis mengaku sangat

khawatir jika hujan deras turun akibat banjir yang kerap melanda kawasan itu.

‘Hujan sedikit saja, air sudah menggenang. Apalagi kalau hujan deras stres dan ketakutan kami,’ kata Painem, 43, salah seorang perwakilan warga, kepada anggota DPRD Sumut, Eveready Sitorus yang melakukan reses ke Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis, Jumat sore.

Menurut ibu rumah tangga ini, banjir yang kerap melanda lokasi tempat tinggalnya itu sudah dialami selama belasan tahun.

“Sejak lima belas tahun lalu saya tinggal di sini, selalu banjir kalau hujan deras turun. Jalan-jalannya juga sangat becek, sehingga kalau melintas kami harus menggunakan kantong plastik untuk alas kaki,” keluhnya.

Painem mengungkapkan, sudah banyak pihak-pihak yang datang meninjau untuk mengaspal jalan tersebut. Namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Dia dan warga lainnya juga mengaku tidak memahami kenapa areal jalan Dusun III Ujung Benteng tak kunjung diperbaiki dan diaspal.

“Lihatlah Pak, jalan-jalan lainnya di kawasan sini semua sudah rapi, kesannya kami seperti anak bawang,” katanya kepada anggota Komisi E DPRD Sumut ini.

Di wilayah daerah pemilihan (Dapil) nya itu, Eveready yang juga Politisi Partai Gerindra ini banyak menerima keluhan warga, di antaranya mengenai infrastruktur dan saluran drainase yang belum maksimal hingga menyebabkan beberapa rumah warga banjir saat hujan deras turun.

Keluhan yang sama juga disampaikan Nurhayati, warga Jalan H Jalal Dusun III, Batang Kuis. Dia mengatakan banjir hingga memasuki rumah-rumah warga.

Eveready menyampaikan reses yang dilakukannya dalam upaya

menjeput aspirasi masyarakat yang akan dibawanya untuk dibahas dalam Musrembang bersama kalangan eksekutif Pemprov Sumut.

“Kalau pembangunan yang memang sudah diprogramkan pada tahun ini pasti berjalan,” katanya didampingi Kepala Dusun III Desa Bintang Meriah, Sutrisno.

Reses, kata Eveready juga dalam upaya menyosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. “Sejumlah program pemerintah, misalnya dana desa itu harus dijeput dan diperjuangkan. Melalui reses inilah diketahui apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujarnya pada kegiatan yang dihadiri ratusan warga itu.

Reses Eveready ke wilayah itu menjadi semakin meriah dengan hiburan seni tradisional “reok”.

Menurut Eveready seni tradisional itu memang harus terus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat.

“Buktinya masih banyak yang tertarik untuk menyaksikannya. Saat kita tanya hampir semua memilih pertunjukan reok daripada musik keyboard di acara ini,” ucap pembina 119 sanggar seni ini. (LMC-02 )

---

## **Kader PDI Perjuangan Diminta Mampu Jadi “Agen” Pemerintah**



**Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar, SE, MM dalam reses internal dengan kader PDI Perjuangan dan masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, Kamis (15/12) malam. (LintasMedan/ist)**

Medan, 16/12 (LintasMedan) – Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan diminta mampu menjadi “agen” pemerintah untuk menyukseskan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Brilian Moktar, SE, MM dalam reses internal dengan kader PDI Perjuangan dan masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, Kamis (15/12) malam.

Menurut Brilian, sebagai kader parpol pendukung pemerintah, kader PDI Perjuangan harus mampu menjalankan fungsi dan peran ganda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi dan peran ganda yang dimaksudkan adalah menjadi “penyambung lidah” masyarakat kepada pemerintah dan menjadi pencerah bagi masyarakat atas program yang dijalankan pemerintah.

Di satu sisi, kader PDI Perjuangan memang berhak untuk memberikan masukan kepada aparatur pemerintah mengenai kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Sesuai dengan tingkatannya, kader PDI Perjuangan harus mampu mengambil peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada aparaturnya pemerintah di daerah masing-masing.

Ia mencontohkan kader PDI Perjuangan di Kecamatan Medan Tembung agar mampu berkoordinasi dengan aparaturnya di kecamatan dan kelurahan mengenai masalah sosial yang terjadi.

“Kalau ada masalah yang terjadi di daerah masing-masing, jangan sungkan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan camat dan lurah” katanya.

Namun di sisi lain, kader PDI Perjuangan juga harus mampu “agen” pemerintah dengan menjelaskan dan menyampaikan informasi mengenai program pembangunan yang dijalankan.

Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki banyak program pembangunan yang ditujukan untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat.

Namun berbagai program pemerintah tersebut akan sulit terealisasi dan mencapai hasil maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Nah, disitu peran kader PDI Perjuangan untuk menjelaskan sehingga masyarakat mengerti dan mendukung program yang dijalankan pemerintah” kata Brilian.

Bentuk lain dari agen pemerintah yang perlu dilakukan kader PDI Perjuangan adalah menjadi motor penggerak program pembangunan dan inisiator penyelesaian masalah di daerah masing-masing.

Ia mencontohkan masalah banjir yang sering terjadi di Kota Medan akibat fungsi sistem drainase yang terganggu karena banyaknya sampah yang menghadang aliran air.

Untuk itu, kader PDI Perjuangan diminta mampu menjadi inisiator dalam gotong royong di lingkungan masing-masing sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan.



“Apalagi kader kita Akhyar Nasution saat ini menjadi Wakil Walikota Medan. Sebagai kader, kita harus mendukung beliau dengan menjadi inisiator pembangunan di daerah masing-masing” ujar Brilian Moktar.

Dalam reses itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan tentang kerawanan banjir, kesulitan mendapatkan raskin, dan dampak negatif pembangunan “elevated track” kereta api di Jalan Mandala By Pass.

Edi Manopo, warga Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung mengeluhkan ruas jalan di kelurahan itu, termasuk di depan kantor lurah sendiri mudah mengalami banjir.

Demikian juga dengan puskesmas pembantu di Jalan Tangkul 1, Kelurahan Sidorejo Hilir yang ruitn tergenang ketika menerima curah hujan lebat.

Kemudian, Refda Silalahi warga Kelurahan Bantan menyampaikan keluhan warga Kelurahan Bantan dan Kelurahan Bantan Timur yang rutin menerima debu akibat pembangunan elevated track kereta api.

Material tanah pembangunan jalan jalan untuk rel kereta api itu banyak yang tercecer sehingga menjadi debu ketika sudah kering. Debu itu bukan hanya terbang ke rumah warga, tapi jga ke berbagai kios dan warung yang menjual makanan sehingga pembeli enggan berkunjung.

Sedangkan Nazaruddin Lumbantobing Kelurahan Bantan mengeluhkan kesulitan warga mendapatkan raskin meski telah diberikan kartu sebagai alat untuk menukarkannya.

“Kartu raskinnya ada tetapi tidak mendapatkan beras lagi, aparat kelurahan bilang raskin tidak ada lagi” katanya.

Menanggapi keluhan warga itu, Brilian Moktar berjanji akan mengomunikasikannya dengan Pemko Medan sehingga masalah warga dapat segera diatasi.

Namun ia juga meminta kader PDI Perjuangan di Kecamatan Medan Tembung untuk berperan karena mengenal dan berhadapan langsung dengan aparat pemerintah di kecamatan kelurahan, termasuk perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek dari PT KAI. (LMC-02)

---

## Mahasiswa Minta DPRD Soroti Persoalan Drainase



ilustrasi

Medan, 15/12 (LintasMedan) – Forum Mahasiswa Sumatera Utara (Forsu) meminta DPRD Medan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk proyek pembangunan drainase.

Menurut mereka, banyak dugaan korupsi yang terjadi, lantaran mengeluarkan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kota Medan.

“Kami meminta kepada DPRD Medan segera buat Pansus terkait pembangunan drainase saat ini,” kata koordinator aksi, Adnan Lubis di depan Gedung DPRD Medan, Kamis.

Puluhan orang yang melakukan aksi tersebut, meminta juga agar Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Bina Marga.

“Ada drainase yang sudah selesai namun dibongkar kembali karena adanya temuan yang beraroma korupsi,” katanya.

Mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar tidak tebang pilih dalam menangani persoalan korupsi di tubuh Dinas Bina Marga. (LMC/Trbn)

---

## **Proyeksi Belanja Langsung Pemko Medan Naik Rp 359,784 Miliar**



Ilustrasi

Medan, 15/12 (LintasMedan) – Walikota Medan dan DPRD Medan menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017.

Proyeksi belanja langsung (BL) tahun 2017 disepakati Rp 3,522 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 359,784 miliar dibanding proyeksi APBD 2016, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 235,724 miliar dibandingkan proyeksi pada PAPBD 2016.

Sementara, struktur belanja tidak langsung (BTL) disepakati Rp 1,948 triliun, turun sebesar Rp 255,635 miliar dibanding APBD

2016 atau turun Rp 502,393 dibanding PAPBD 2016.

Perubahan struktur belanja itu disepakati setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan, terkait KUA-PPAS tahun anggaran 2017.

Resume hasil pembahasan disebutkan sejumlah perubahan BL, diantaranya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang awalnya (KUA-PPAS sebelum pembahasan) Rp 337,497 miliar menjadi Rp 382,577 miliar. Sekretariat DPRD Medan awalnya Rp 101,853 miliar menjadi Rp 109,807 miliar.

Dinas Kominfo dan Persandian awalnya Rp 22,038 miliar bertambah menjadi Rp 33,632 miliar, Bagian Hubungan Masyarakat awalnya Rp 11,234 miliar menjadi Rp 13,234 miliar. Dinas Perindustrian awalnya 4,575 miliar menjadi Rp 5,525 miliar, Dinas Perdagangan awalnya Rp 25,942 miliar menjadi Rp 26,142 miliar.

“KUA-PPAS ini menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2017. Kita berharap penyusunan RAPBD dilakukan secara menyeluruh dan menghasilkan program yang bermanfaat sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Medan,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, sebelum penandatanganan kesepakatan bersama KUA-PPAS Medan tahun 2017 di gedung DPRD Medan, Kamis (15/12).

Anggota Banggar DPRD Medan Irsal Fikri mengatakan, perencanaan pembangunan tahun 2017 fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal itu yang mengakibatkan BL mengalami penambahan yang besar.

Terkait pengurangan BTL sebesar Rp 255,635, tidak terlepas dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang baru disahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Struktur Pejabat Daerah mengamanahkan perampingan jabatan struktural di daerah.

“Memang kita belum lihat perubahan setelah Perda Perangkat daerah disahkan. Tapi, yang jelas perubahan itu mempengaruhi struktur belanja. Dari pengurangan belanja tidak langsung, ini merupakan dampak perubahan struktur pejabat daerah. Belanja tidak langsung itu kan belanja pegawai dan belanja rutin,” katanya. (LMC-03)

---

## Walikota Harus Selektif Rekrut Pejabat



Medan, 14/12 (LintasMedan) – Sembilan fraksi di DPRD Kota Medan dalam pendapatnya dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda persetujuan bersama sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan, Rabu yang dipimpin Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam pendapatnya yang disampaikan, Herri Zulkarnain mengingatkan Walikota Medan harus benar-benar selektif dalam melakukan rekrutmen pengisian jabatan struktur pada masing-masing perangkat daerah, sehingga terpilih orang-orang yang memiliki integritas yang baik, memenuhi persyaratan yang ditentukan, juga memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya di jabatan tersebut.

“Kami (FPD, red) yakin Walikota Medan nantinya tidak memaksakan mereka-mereka yang tidak berprestasi dan belum teruji serta tidak memiliki kompetensi di bidangnya untuk didudukkan dalam jabatan struktural. Bila ini terjadi, Pemko Medan akan sulit memberhasilkan visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan Kota Medan sebagaimana yang diharapkan bersama,” katanya.

Selain itu, sebut Herri, FPD mengharapkan aparatur yang menduduki jabatan struktural tidak terkait dengan kepentingan organisasi kemasyarakatan yang ada. “Hal ini perlu kami sampaikan, agar Kepala SKPD terkait lebih fokus menjalankan kinerjanya memberhasilkan visi misi kepala daerah dalam percepatan pembangunan Kota Medan,” katanya.(LMC-03)